

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 083/HK.01.01/K.JI-25/12/2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang** : 1. dalam rangka memenuhi kewajiban dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2023, Revisi ke-8 tanggal 09 Oktober 2023;
 8. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Nomor : 083/HK.01.01/K.JI-25/12/2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO.
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kota Probolinggo tidak termasuk informasi yang dikecualikan
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2023, Revisi ke-8 tanggal 09 Oktober 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Probolinggo
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KETUA,

JOHAN DWI ANGGA, S.Pd

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA PROBOLINGGO

INFORMASI BERKALA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Wak tu dan Tempat Pembatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyim panan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu							
1	Alamat Lengkap	administrasi	administrasi	2019		√	Sesuai dengan retensi arsip
2	Visi dan Misi	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
3	Struktur Organisasi Sekretariat	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
4	Struktur PPID	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
5	Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
6	Profil Singkat Sekretariat	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
7	Tugas, Wewenang dan Kewajiban	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
8	Sejarah Kepengawasan	administrasi	administrasi	2019		√	Sesuai dengan retensi arsip
II. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu							
9	Laporan Akhir Divisi Penanganan	Penangan an	Penangan an	2019		√	Sesuai dengan retensi arsip

	pelanggaran Pemilu 2019	Pelanggar an (PP)	Pelanggar an (PP)				
10	Laporan Akhir Divisi Pengawasan 2019	Pengawasan	Pengawasan	2019		√	Sesuai dengan retensi arsip
11	Laporan Komprehensif 2019	administrasi	administrasi	2019		√	Sesuai dengan retensi arsip
12	Laporan Akhir Divisi Pengawasan 2020	Pengawasan	Pengawasan	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
13	Laporan Akhir Divisi OSDM 2020	administrasi	administrasi	2021	√	√	Sesuai dengan retensi arsip
14	Laporan Akhir PPID 2020	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
15	Laporan Akhir Kehumasan 2020	Humas	Humas	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
16	Laporan Akhir Divisi OSDM 2021	administrasi	administrasi	2022	√	√	Sesuai dengan retensi arsip
17	Laporan Akhir Divisi Pengawasan 2021	Pengawasan	Pengawasan	2022	√	√	Sesuai dengan retensi arsip
18	Laporan Akhir PPID 2021	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
19	Laporan Akhir Kehumasan 2021	Humas	Humas	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
20	Laporan Akhir Divisi OSDM 2022	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
21	Laporan Akhir Divisi Pencegahan 2022	Pencegahan	Pencegahan	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
22	Laporan Akhir Divisi Hukum 2023	Hukum	Hukum	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
23	Laporan Akhir Divisi Pencegahan 2023	Pencegahan	Pencegahan	2023	√	√	Sesuai dengan retensi arsip
24	Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa 2023	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	2023	√	√	Sesuai dengan retensi arsip
25	Laporan Akhir Divisi OSDM 2023	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
26	Laporan Akhir Kehumasan 2023	Humas	Humas	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
27	Renja 2019	administrasi	administrasi	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
28	Renja 2020	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
29	Renja 2021	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip

30	Renja 2022	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
31	Renja 2023	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
32	Agenda Kegiatan dan Pelaksanaan Tugas 2019	administrasi	administrasi	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
III. Informasi Mengenai Keuangan							
33	Laporan BMN 2017	BMN	BMN	2017		√	Sesuai dengan retensi arsip
34	Laporan BMN 2018	BMN	BMN	2018		√	Sesuai dengan retensi arsip
35	Laporan BMN 2019	BMN	BMN	2019		√	Sesuai dengan retensi arsip
36	Laporan BMN 2020	BMN	BMN	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
37	Laporaan BMN 2021	BMN	BMN	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
38	Laporan BMN 2022	BMN	BMN	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
39	DIPA 2017	administrasi	administrasi	2017		√	Sesuai dengan retensi arsip
40	DIPA 2018	administrasi	administrasi	2018		√	Sesuai dengan retensi arsip
41	DIPA 2019	administrasi	administrasi	2018		√	Sesuai dengan retensi arsip
41	DIPA 2020	administrasi	administrasi	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
43	DIPA 2021	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
44	DIPA 2022	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
45	DIPA 2023	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
46	DIPA 2024	administrasi	administrasi	2024		√	Sesuai dengan retensi arsip
46	RKA 2020	administrasi	administrasi	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
47	RKA 2021	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
48	RKA 2022	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
49	RKA 2023	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip

	RKA 2024	administrasi	administrasi	2024		√	Sesuai dengan retensi arsip
50	LHKPN Azam Fikri Tahun 2020	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
51	LHKPN Samsun Ninilouw Tahun 2020	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
52	LHKPN Ilmiah Tahun 2020	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
53	LHKPN Budi Bachruddin Setiawan Tahun 2020	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
54	LHKPN 2021	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
55	LHKPN Johan Dwi Angga Tahun 2024	administrasi	administrasi	2024		√	Sesuai dengan retensi arsip
56	LHKPN Putut Gunawarman Fitriana Tahun 2024	administrasi	administrasi	2024		√	Sesuai dengan retensi arsip
57	LHKPN Ade Nurwahyudi Tahun 2024	administrasi	administrasi	2024		√	Sesuai dengan retensi arsip
58	LHKPN Tommy Yoga Aditama Tahun 2024	administrasi	administrasi	2024		√	Sesuai dengan retensi arsip

IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian

59	Informasi Kepegawaian 2017	administrasi	administrasi	2017		√	Sesuai dengan retensi arsip
60	Informasi Kepegawaian 2018	administrasi	administrasi	2018		√	Sesuai dengan retensi arsip
61	Informasi Kepegawaian 2019	administrasi	administrasi	2019		√	Sesuai dengan retensi arsip
62	Informasi Kepegawaian 2020	administrasi	administrasi	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
63	Informasi Kepegawaian 2021	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
64	Informasi Kepegawaian 2022	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
65	Informasi Kepegawaian 2023	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip

V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik

66	Daftar Informasi Publik 2020	administrasi	administrasi	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
67	Daftar Informasi Publik 2021	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip

68	Daftar Informasi Publik 2022	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
69	Daftar Informasi Publik 2023	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penangg ungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	

VI. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan

70	Nota Kesepahaman (MoU) Dengan Universitas STIA Bayuangga dan STAI Muhammadiyah	Pengawasan	Pengawasan	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
71	Deklarasi Kalah Terhormat Menang Bermartabat Pemilu 2019	Pengawasan	Pengawasan	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
72	Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA Pilkada 2018	Pengawasan	Pengawasan	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
73	Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kota Probolinggo dengan Gerakan Pemuda Ansor Kota Probolinggo	Pengawasan	Pengawasan	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
74	Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kota Probolinggo dengan Himpunan Mahasiswa Islam Probolinggo	Pengawasan	Pengawasan	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip

75	Perjanjian kerjasama Bawaslu Kota Probolinggo dengan Pengurus Cabang Nahlatul Ulama Kota Probolinggo	Pengawasan	Pengawasan	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
76	Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kota Probolinggo dengan Persatuan Disabilitas Probolinggo	Pengawasan	Pengawasan	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
77	Pedoman Tata Tertib Kepegawaian	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
78	Pedoman Pengelolaan Administrasi	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
79	Pedoman Pengelolaan Organisasi	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
80	Pedoman Pengelolaan Keuangan	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
VII. Buletin Bawaslu Kota Probolinggo							
81	Brita Edisi 1	Humas	Humas	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
82	Brita Edisi 2	Humas	Humas	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
83	Brita Edisi 3	Humas	Humas	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
84	Brita Edisi 4	Humas	Humas	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
VIII. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik							
85	SK PPID 2020	administrasi	administrasi	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
86	SK Perubahan PPID 2021	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
87	SK Perubahan PPID 2022	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
88	SK Perubahan PPID 2023	administrasi	administrasi	2023		√	Sesuai dengan retensi arsip
89	SK Perubahan PPID 2024	administrasi	administrasi	2024		√	Sesuai dengan retensi arsip
90	SOP Klasifikasi Informasi	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
91	SOP Pelayanan Informasi	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip

92	SOP Penanganan Keberatan Informasi	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
93	SOP Penanganan Sengketa Informasi	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
94	SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
95	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
96	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
97	SOP Penyusunan DIP	administrasi	administrasi	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
98	SOP Keberatan informasi Pemilihan di Bawaslu administrasi		administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
99	SOP Klasifikasi Informasi	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
100	SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
101	SOP Penanganan Keberatan	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
102	SOP Penatausahaan Barang Milik Negara	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
103	SOP Pengelolaan Daftar Informasi	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
104	SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Bawaslu RI	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
105	SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
106	SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip

	Pengadaan						
107	SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
108	SOP Persuratan dan Arsip	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
109	SOP Prosedur Pengaduan Internal (datang langsung)	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
110	SOP Surat Keluar Tata Usaha Pimpinan	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
111	SOP Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang di kecualikan	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
112	Tata Cara Permohonan Informasi	Humas	Humas	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
113	Tata Cara Pengajuan Keberatan	Humas	Humas	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
114	Tata Cara Pengajuan Sengketa ke KI	Humas	Humas	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
IX. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu							
115	Alur Pelaporan Dugaan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran (PP)	Penanganan Pelanggaran (PP)	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
116	Alur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Penanganan Pelanggaran (PP)	Penanganan Pelanggaran (PP)	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
117	Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu	Penanganan Pelanggaran (PP)	Penanganan Pelanggaran (PP)	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
118	Alur Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu	Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran (PP)	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip

		(PP)					
119	Alur Penindakan PERBAWASLU 2020	Penanganan Pelanggaran (PP)	Penanganan Pelanggaran (PP)	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
120	Alur Sengketa Pemilu	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	2021		√	Sesuai dengan retensi arsip
X.Informasi Mengenai dan/atau Kebijakan							
121	Analisis Perbawaslu Gakkumdu	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
122	Analisis Kebutuhan Perbawaslu terhadap Undang undang Pemilu	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
123	Analisis Perbawaslu Gakkumdu	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
124	Pedoman penilaian PPNPS Rancangan Perbawaslu Pengawasan Atas	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
125	Pendaftaran, Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
126	Rancangan Perbawaslu tentang Pembentukan Pengawas Pemilu	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
127	Rancangan Perbawaslu tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Rancangan Perbawaslu tentang Penyelesaian	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
128	Pelanggaran Administratif Pemilu dan Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif pada	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip

129	Rancangan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
-----	---	--------------	--------------	------	--	---	-----------------------------

INFORMASI SERTA MERTA

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	online	

XI. Putusan

130	Putusan Sidang Penyelesaian Sengketa Pilkada 2018	Penyelesaian Sengketa	Hukum	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
131	Putusan Mediasi Partai Hanura Pemilu 2019	Hukum	Hukum	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip
132	Data Pelanggaran Pemilu 2019	Penanganan Pelanggaran (PP)	Penanganan Pelanggaran (PP)	2020		√	Sesuai dengan retensi arsip

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
133	Informasi Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik dikecualikan	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip

134	Informasi Penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dikecualikan	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
135	Penetapan PPID tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu yang dikecualikan	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
136	Penetapan PPID tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum yang dikecualikan	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
137	Penetapan PPID tentang Informasi Pengawas Pemilu yang dikecualikan	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip
138	Pengecualian Informasi	administrasi	administrasi	2022		√	Sesuai dengan retensi arsip